

**Laporan Kegiatan Initiative
”Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”**

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Jumat, 19 Juni 2026
Narasumber	Jimmy Daniel Berlianto (CIPS)
Moderator	Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Jumat, 19 Juni 2026, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan diskusi Initiative! Dengan host Made Natasya Restu Dewi Pratiwi selaku Peneliti Bidang Sosial dan mengundang Jimmy Daniel dari Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) selaku Senior Researcher.

Di awal diskusi, Jimmy menyoroti bahwa tantangan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pada penyediaan makanan, melainkan pada tata kelola sistem pangan secara keseluruhan. Saat ini masih terdapat inkoherensi antara kebijakan pangan dan gizi, mulai dari aspek produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan. Padahal, keberhasilan program sangat bergantung pada rantai pasok (*supply chain*) yang kuat dan terintegrasi, mengingat kebutuhan pangan di perkotaan juga ditopang oleh wilayah pedesaan.

Natasya kemudian menambahkan bahwa MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan makanan yang tersedia benar-benar sehat dan mendukung perubahan perilaku. Oleh karena itu, pendidikan gizi perlu menjadi bagian penting dari program agar siswa mampu memahami dan memilih pangan sehat, tidak hanya saat berada di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, siswa berpotensi menjadi agen perubahan yang menyebarkan pemahaman mengenai pola makan sehat kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, sejumlah persoalan implementasi masih menjadi perhatian, seperti lemahnya rantai pasok yang berpotensi menyebabkan kualitas makanan menurun, termasuk makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Karena itu, perbaikan tata kelola di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi harapan penting. Narasumber juga menilai bahwa masih tersedia ruang

kebijakan untuk melakukan transisi menuju model tata kelola yang lebih baik melalui exit strategy yang jelas dan terencana.

Dari sisi keberlanjutan, model ekspansi MBG yang saat ini dijalankan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang berkelanjutan. Keberlangsungan operasional dapur-dapur MBG dalam jangka panjang menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Meski demikian, program MBG pada dasarnya bukanlah kebijakan yang buruk. Berbagai pengalaman internasional menunjukkan bahwa program makan sekolah memiliki dampak positif terhadap kesehatan, pendidikan, kehadiran siswa, serta perekonomian lokal.

Namun, implementasi program juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Saat ini terdapat potensi disrupsi terhadap aktivitas pendidikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar maupun beristirahat. Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendekatan yang lebih adaptif diperlukan, misalnya dengan memulai melalui model dapur terpusat (centralized kitchen) sembari secara bertahap membangun ekosistem pangan dan infrastruktur lokal yang mendukung.

Menutup diskusi, Jimmy mengingatkan bahwa kegagalan banyak kebijakan pembangunan sering kali terjadi karena pemerintah hanya meniru bentuk suatu kebijakan tanpa meniru faktor-faktor yang membuat kebijakan tersebut berhasil di negara lain. Akibatnya, kebijakan tampak sukses di atas kertas tetapi tidak menghasilkan dampak substantif. Karena itu, aspek yang paling mendesak untuk dibenahi dalam implementasi MBG adalah tata kelolanya, bukan sekadar desain programnya.